

**TINJAUAN FIKIH SIYASAH TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK  
PENYELENGGARA PEMILU**

**(Studi Analisis Terhadap Putusan Penyelenggara DKPP RI No. 16-PKE-  
DKPP/I/2019)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh :

**Lukmansyah**

**NPM : 1421020087**

**Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)**



**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

**1442 H/ 2021 M**

## ABSTRAK

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) adalah sebuah lembaga penegak kode etik bagi penyelenggara Pemilu. Yang bertugas untuk menyelesaikan kasus malpraktik profesi yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu. Meskipun peran DKPP hanya terbatas pada ranah kode etik semata, akan tetapi peran tersebut akan mempengaruhi iklim demokrasi di Indonesia. Terlebih DKPP dalam putusannya berwenang memberikan sanksi kepada penyelenggara Pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Adanya sanksi diharapkan akan menjadi pertimbangan bagi penyelenggara Pemilu untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya.

Dalam Islam, terdapat sebuah lembaga yang hampir sama perannya dengan DKPP yakni lembaga *hisbah*. *Hisbah* adalah suatu sistem kelembagaan yang berfungsi untuk mengawasi berjalannya konsep *al-amr bi ma'ruf wa al-nahy al-munkar*. Selain itu lembaga *hisbah* juga berperan dalam menjadikan kebiasaan baik sebagai kebiasaan umum. Perbedaan DKPP dengan *hisbah* terletak pada jangkauan kewenangannya, di mana *hisbah* lebih umum dibanding dengan DKPP.

Rumusan masalah yang nantinya akan dipecahkan penulis dalam skripsi ini adalah; 1) bagaimana mekanisme penetapan putusan oleh DKPP pada putusan No. 16-PKE-DKPP/I/2019?, 2) bagaimana tinjauan fikih siyasah terhadap mekanisme penetapan putusan oleh DKPP pada putusan No. 16-PKE-DKPP/I/2019?.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme penetapan putusan DKPP No. 16-PKE-DKPP/I/2019 dan untuk mengetahui pandangan fikih siyasah terhadap mekanisme penetapan putusan DKPP No. 16-PKE-DKPP/I/2019.

Skripsi ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*), dengan menelaah bahan-bahan yang berupa buku-buku hukum, Undang-undang dan Peraturan-peraturan lainnya yang ada relevansinya dengan permasalahan yang penulis akan bahas. Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, mengingat penelitian ini adalah penelitian kepustakaan maka peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber buku yang ada seperti literatur pemikiran ilmu politik Islam, dan fiqh siyasah serta tulisan-tulisan yang lain termasuk media internet untuk mengakses bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa mekanisme dalam putusan Nomor 16-PKE-DKPP/I/2019 DKPP RI sudah sesuai dengan UU No 7 tahun 20017 dan peraturan DKPP Nomor 2 tahun 2017. Adapun dalam hukum Islam, terdapat lembaga yang serupa dengan DKPP yakni lembaga *hisbah*, keduanya sama-sama melakukan pengawasan dan menangani kasus terkait dengan pelanggaran etika dan moral.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung (0721) 703260

SURAT PERNYATAAN

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lukmansyah  
NPM : 1421020087  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (Studi Analisis Terhadap Putusan No.16-PKE-DKPP/I/2019)" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada pihak penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Bandar Lampung, 09 November 2020

Penyusun



Lukmansyah  
NPM. 1421020087



**KEMENTRIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

Jln. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp (0721)703289

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Pelanggaran Kode  
Etik Penyelenggara Pemilu (Studi Analisis  
Terhadap Putusan No.16-PKE-DKPP/I/2019)

Nama Mahasiswa : Lukmansyah  
NPM : 1421020087  
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)  
Fakultas : Syari'ah

**MENYETUJUI**

Untuk di munaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang  
Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag.

Nip : 195902151986031004

Pembimbing II

Dr. Agus Hermanto, M.H.I

Ketua Jurusan

Frenki, M.Si

NIP. 198003152009011017





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH

Jln. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp (0721)703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (Studi Analisis Terhadap Putusan No.16-PKE-DKPP/I/2019 DKPP RI)**” disusun oleh, Lukmansyah, Npm: 1421020087 Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*), Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal: 03 Desember 2020

TIM PENGUJI

Ketua : Marwin, S.H., M.H.

Sekretaris : Rudi Santoso, M.H.I., M.H.

Penguji I : Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H.

Penguji II : Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag.

Penguji III : Dr. Agus Hermanto, M.H.I.

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah  
Dr. H. Khairuddin, M.H.  
NID. 196210221993031002

## MOTTO

﴿ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شٰهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوْ اِلْوَالِدِيْنَ  
وَالْاَقْرَبِيْنَ اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاَللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوْا اَهْوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا ۚ وَاِنْ  
تَلُوْا اَوْ تُعْرَضُوْا فَاِنَّ اَللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ۝۱۳۵﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. al-Nisa : 135).<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Departemen Agama Islam RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012) , h. 131.

## PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati mengucapkan Alhamdulillah sembah sujud serta rasa syukur kepada Allah swt., untuk segala nikmat dan kekuatan yang telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, sehingga dengan rahmad-Nya karya ini dapat diselesaikan. Skripsi ini peneliti persembahkan sebagai tanda cinta kasih, tanjang jawab dan hormat tak terhingga kepada :

1. Orang tuaku tercinta, Ayah Samsu dan Ibu Hauroni yang telah merawatku, membesarkanku serta mendidikku dengan penuh cinta dan kasih sayang, menyekolahkanku, berjuang untuk keberhasilanku, mendoakanku dan selalu sabar memberikan motivasi supaya aku tetap semangat. Berkat pengorbanan, jerih payah dan motivasi yang selalu diberikan akhirnya terselesaikan skripsi ini.
2. Abang, Kaka, keponakanku tersayang Reyhan Wildan Zohir, serta Mutia Ulfah yang selalu menghiburku ketika aku merasa lelah dan memberikan semangat untuk terus berjuang hingga akhir.
3. Seluruh keluarga besar PMII Rayon Syariah, Rayon Febi, Klasika, Odda Sensei, dan patner kerja di CC, yang telah memberiku pelajaran berharga selama hidupku.
4. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung kebanggaanku.

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis dilahirkan di Desa Banding Agung, Kecamatan Punduh Pedada, Kabupaten Pesawaran, pada tanggal 15 Agustus 1995, anak bungsu dari dua bersaudara, putera dari pasangan Samsu dan Hauroni.

Pendidikan yang penulis tempuh di antaranya:

1. Sekolah Dasar Negeri 01 Banding Agung pada tahun 2001-2007.
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 02 Punduh Pedada pada tahun 2007-2010.
3. Taman Madya Teluk Betung pada Tahun 2010- 2013.
4. Kemudian penulis melanjutkan studi S1 di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung di Jurusan Siyasah.





## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum, Wr. Wb*

Puji dan syukur kehadiran Allah swt., yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi yang berjudul “Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (Studi Analisis Terhadap Putusan No. 16-PKE-DKPP/I/2019 DKPP RI) dapat diselesaikan. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw., beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam ilmu syariah pada Program Studi Siyasah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, diucapkan terima kasih atas bantuan semua pihak. Secara rinci ucapan terima kasih disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah
3. Bapak Frengki, M.Si. selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara
4. Bapak Drs. H. Mohammad Rusfi, M.Ag. dan bapak Dr. Agus Hermanto, M.H.I selaku dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan arahan demi terselesaikannya skripsi ini.

5. Bapak/Ibu dosen di Fakultas Syariah serta Bapak/Ibu guru TK, SD, SMP, dan SMA yang dengan tulus dan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan.
6. Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan perpustakaan Syari'ah yang telah memberikan informasi, data, referensi dan lain-lain.
7. Kekasihku tersayang Mutia Ulfah terimakasih atas kasih sayang, perhatian, dan kesabaranmu yang telah memberikanku semangat dan inspirasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini, semoga engkau pilihan terbaik buatku, dan untuk masa depan kita, Terimakasih sayang.
8. Sahabat-sahabat PMII Rayon Syariah, termikasih banyak sahabat.
9. Rekan kerja di Cikiber Cemewew, Terimakasih banyak atas masukan dan semangat yang kalian berikan terhadap saya. (Bang Yogie, bang MBUL, bang Sarhan, bang Ridho, Ibnu, Joko, Indra, Meydi, dan bang Rohaji)
10. Almamaterku tercinta tempatku menempuh ilmu semoga dapat bermanfaat dunia dan akhirat.

Semoga semua bantuan yang telah diberikan selama ini dibalas oleh Allah swt., dengan kebaikan yang berlipat ganda. Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, dikarenakan keterbatasan waktu, dan kemampuan yang dimiliki. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang dapat membangun sangat diharapkan dan diterima dengan sepenuh hati. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Amin.

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb***

Bandar Lampung, 24 Januari 2021

**Lukmansyah**  
**NPM. 1421020087**



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	
ABSTRAK .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN .....	iii
MOTTO .....	iv
PESEMBAHAN.....	v
RIWAYAT HIDUP .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang Masalah .....	3
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	10
F. Metodologi Penelitian.....	11

### BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Fiqh Siyasah .....	15
B. Ruang lingkup Fiqh Siyasah.....	18
C. Pengertian dan Objek Kajian Siyasah Dusturiyah.....	20
D. Konsep Peradilan dalam Siyasah Dusturiyah.....	22
E. <i>Hisbah</i> .....	
1. Pengertian <i>Hisbah</i> .....	23
2. <i>muhtasib</i> .....	25
3. Peran lembaga <i>Hisbah</i> .....	29

**BAB III DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU  
(DKPP) DAN PUTUSAN NO. 16-PKE-DKPP/I/2019 DKPP RI**

A. Sejarah DKPP .....	39
B. Peran DKPP dalam penegakkan kode etik penyelenggaraan Pemilu .....	44
C. Kode Etik Penyelenggara Pemilu .....	47
D. Mekanisme Penetapan Putusan Tentang Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Oleh DKPP .....	59
E. Putusan no. 16-PKE-DKPP/I/2019 DKPP RI .....	61

**BAB IV TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PUTUSAN DKPP  
TENTANG PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA  
PEMILU (STUDI PUTUSAN NO. 16-PKE-DKPP/I/2019 DKPP RI)**

A. Analisis Mekanisme Penetapan Putusan DKPP no. 16-PKE- DKPP/I/2019 DKPP RI .....	64
B. Tinjauan <i>Fiqh Siyasa</i> Terhadap Mekanisme Penetapan Putusan DKPP no. 16-PKE-DKPP/I/2019 DKPP RI .....	71

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	78
B. Saran .....	79

**DAFTAR PUSTAKA .....**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Pada kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan skripsi ini maka perlu adanya ulasan terhadap penegasan arti dan maksud dari beberapa istilah yang terkait dengan judul skripsi ini. Agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan. Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (Studi Analisis Terhadap Putusan DKPP RI No. 16-PKE-DKPP/I/2019)”** untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami maksud dan tujuan serta ruang lingkup maka perlu adanya penegasan judul tersebut.

1. Tinjauan menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu hasil meninjau atau pandangan atau pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).<sup>2</sup>
2. *Fikih siyasah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.<sup>3</sup>
3. Putusan merupakan hasil memutuskan.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1470.

<sup>3</sup> Muhammad Iqbal Isl, *Fiqh Siyasah- Kontekstualisasi Doktrin Politik islam*, (Indonesia: Pranadamedia Group: 2014), h. 4.

<sup>4</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, *Op. Cit.*, h. 774.

4. DKPP merupakan lembaga yang dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.<sup>5</sup>
5. Pelanggaran yaitu perilaku yang menyimpang untuk melakukan tindakan. Menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang dibuat.<sup>6</sup>
6. Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi Penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.<sup>7</sup>

## **B. Alasan Memilih Judul**

Beberapa alasan dasar dalam memilih judul “Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (Studi Analisis Terhadap Putusan DKPP RI No. 16-PKE-DKPP/I/2019)” adalah sebagai berikut :

---

<sup>5</sup> Pasal 155 ayat (2) *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017* tentang Pemilihan Umum.

<sup>6</sup> <http://sarwono-supeno.blogspot.co.id/2012/04/pengertian-pelanggaran.html>. (Diunduh 10 September 2019, Pukul 14.25 WIB).

<sup>7</sup> Pasal 1 ayat (4) *Peraturan dewan kehormatan penyelenggara pemilihan umum Republik indonesia* Nomor 2 tahun 2019.

### 1. Alasan subjektif

- a. Pembahasan ini sangat sesuai dengan konsentrasi keilmuan penulis sehingga nantinya akan memudahkan penulis dalam melakukan pembahasan mengenai masalah ini.
- b. Permasalahan ini penulis angkat karena belum ada yang melakukan pembahasan terhadap permasalahan ini khususnya di UIN Raden Intan Lampung, dan permasalahan ini sangat mungkin dibahas karena tersedianya literatur yang mendukung.

### 2. Alasan objektif

- a. Penyelenggara Pemilu memiliki kedudukan penting dalam menjamin terwujudnya Demokrasi yang Ideal, untuk itu diperlukan sosok yang cakap dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu.
- b. Permasalahan tersebut menarik untuk dibahas dan dilakukan penelitian. Untuk mengkaji lebih dalam tentang mekanisme lahirnya putusan DKPP yang menyangkut tentang pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.

## **C. Latar Belakang Masalah**

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan wujud dari pelaksanaan kedaulatan rakyat dan menjadi suatu syarat mutlak dalam sebuah negara demokrasi. Pemilihan umum yang selanjutnya disebut Pemilu sebagaimana yang telah disebutkan dalam (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan sarana

kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam pelaksanaannya dalam NKRI dengan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>8</sup>

Pelaksanaan Pemilu diharapkan dapat berjalan dengan baik dengan wujud terjalinnya kerjasama antara lembaga yang masuk dalam satuan penyelenggara Pemilu. Apabila Pemilu yang berjalan secara umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat terwujud maka rakyat dapat secara langsung merasakan dampaknya. Peran penyelenggara Pemilu tentunya menduduki posisi penting dalam terciptanya kedaulatan rakyat.

Penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat secara langsung oleh rakyat.<sup>9</sup>

Kemandirian serta independensi penyelenggara Pemilu tentunya sangat dibutuhkan demi terejawantahnya UU Nomor 7 Tahun 2017. Untuk itu diperlukan sebuah lembaga yang memiliki wewenang untuk

---

<sup>8</sup> Pasal 1 Ayat (1) *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*.

<sup>9</sup> Pasal 1 Ayat (7) *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*.

mengawasi berjalannya tugas dari penyelenggara Pemilu tersebut. Nantinya lembaga tersebut akan memiliki aturan khusus mengenai penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu.

Mekanisme mengenai penyelesaian pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu diatur dalam peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019. Dalam peraturan tersebut termuat serangkaian prosedur beracara dalam sidang DKPP, yang pada akhirnya akan melahirkan sebuah putusan yang bersifat final dan mengikat.

DKPP mempunyai kewenangan untuk menerima pengaduan dalam dugaan pelanggaran kode etik oleh penyelenggara Pemilu, melaksanakan verifikasi laporan administrasi dalam pemeriksaan formil, dalam rangka pemeriksaan kelengkapan persyaratan pengaduan dan/atau laporan, dan secara materiil dalam pemeriksaan yang diindikasikan pelanggaran kode etik anggota penyelenggara Pemilu. Lebih lanjut dari pengaduan dan/atau laporan oleh penyelenggara Pemilu, menetapkan putusan dan menyampaikannya secara terbuka kepada masyarakat luas.

Untuk mempermudah dalam melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu mulai dari tingkat pusat sampai daerah, DKPP membentuk Tim Pemeriksa Daerah (TPD) yang terdiri dari unsur DKPP, KPU, Bawaslu dan masyarakat. Sesuai dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 Pasal 32.



Objek perkara yang ditangani oleh DKPP terbatas hanya kepada persoalan perilaku pribadi atau orang per orang pejabat atau petugas penyelenggara pemilihan umum. Objek pelanggaran etika yang dapat diperkarakan serupa dengan kualifikasi tindak pidana dalam sistem peradilan pidana, yaitu menyangkut sikap dan perbuatan yang mengandung unsur jahat dan melanggar hukum yang dilakukan oleh perseorangan individu secara sendiri-sendiri atau pun bersama-sama yang dipertanggung-jawabkan juga secara individu orang per orang. Dengan perkataan lain, yang dapat dituduh melanggar kode etik adalah individu, baik secara sendiri-sendiri atau pun secara bersama-sama, bukan sebagai satu institusi, melainkan sebagai orang per orang. Yang dapat dituduh melanggar kode etik, bukan KPU atau Bawaslu sebagai institusi, tetapi orang per orang yang kebetulan menduduki jabatan ketua atau anggota KPU atau Bawaslu tersebut. Karena itu, pihak yang melaporkan atau yang mengadu harus mampu membuktikan apa saja yang telah dilakukan oleh orang per orang individu ketua atau anggota KPU atau Bawaslu yang dianggap telah melanggar kode etik penyelenggara pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>10</sup>

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI memberhentikan sementara Ali Nurdin Z sebagai anggota Bawaslu Pesawaran. Hal ini berdasarkan putusan DKPP Nomor 16-PKE-DKPP/I/2019 menjatuhkan putusan dugaan pelanggaran kode etik

---

<sup>10</sup> Jimly Asshiddiqie *PENGENALAN TENTANG DKPP UNTUK PENEGAK HUKUM* (Jakarta, Februari 2013), h. 9.

penyelenggara pemilu yang diajukan oleh advocat Nizam Arista. Keterangan dari pengadu (Nizam), Ali Nurdin tidak memenuhi syarat menjadi anggota Bawaslu Pesawaran. Sebab, teradu (Ali) masih atau pernah menjadi anggota partai politik DPC PKB Pesawaran berdasarkan SK Nomor 7023/DPP-03/V/A. 1//II/2011 tentang penetapan susunan dewan pengurus cabang PKB Pesawaran periode 2011-2016.<sup>11</sup>

Dalam putusan DKPP Nomor 16-PKE-DKPP/I/2019 diterangkan bahwa anggota Bawaslu Kabupaten Pesawaran terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Dengan memanipulasi surat pernyataan untuk menjadi anggota Bawaslu Kabupaten Pesawaran “Tidak pernah menjadi anggota partai politik atau telah mengundurkan diri sebagai anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun terakhir dengan melampirkan surat pernyataan dari pengurus partai”. Akan tetapi anggota Bawaslu tersebut hanya mendapatkan sanksi berupa pemberhentian sementara.

Adapun dalam Bab III Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu Pasal 8 (huruf a) berbunyi “netral atau tidak memihak terhadap partai politik, calon, pasangan calon, dan/atau peserta pemilu”. Aturan ini berkesesuaian dengan syarat untuk menjadi anggota Bawaslu, sebab di khawatirkan dalam pelaksanaannya penyelenggara Pemilu yang masih atau pernah menjadi anggota partai akan memihak kepada salah satu partai

---

<sup>11</sup> <https://harianmomentum.com/read/15100/anggota-bawaslu-pesawaran-diberhentikan-ini-sebabnya>, (20 Oktober 2019).

atau calon Presiden serta calon Anggota Legislatif yang diusung oleh partai tersebut.

Keberadaan DKPP dapat dikaji dalam ranah *Fikih Siyasah*, yang masuk ke dalam sub *Siyasah Dusturiyah*. Permasalahan di dalam *Fikih Siyasah Dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di suatu pihak dengan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Oleh karena itu, di dalam *fikih siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>12</sup>

Menurut H.A Djazuli menyebutkan bahwa kelembagaan dalam *siyasah dusturiyyah* itu di bagi menjadi dalam beberapa lembaga di antaranya adalah: Pertama, Lembaga *ahl al-hall wa al-'aqd*; Kedua, Lembaga *imamah* yang di pimpin oleh seorang imam dengan di bantu oleh menteri *tafwidh* (para menteri) dan/ atau menteri *tafwied* (wakil presiden, perdana menteri; Ketiga, Lembaga *aqdiyah*/ peradilan, yang di dalam kepustakaan Islam di kepalai oleh *qadli al-quddat* (Ketua Mahkamah Agung); Keempat, Lembaga keuangan atau lebih di kenal dengan *bait al-mal*, dengan perangkat pengawasannya. DKPP secara khusus masuk ke dalam wilayah lembaga *aqdiyah*/ peradilan.

---

<sup>12</sup> Dzajuli *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2003), h. 47.

﴿ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ ۚ شٰهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوْ اَوْلٰدِيْنَ  
وَالْاَقْرَبِيْنَ ۚ اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاَللّٰهُ اَوَّلٰى بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوْا الْهَوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا ۚ وَاِنْ  
تَلَوْا اَوْ تَعْرَضُوْا فَاِنَّ اَللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ۝۱۳۵﴾

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miSKin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”*. (Q.S. al-Nisa : 135).<sup>13</sup>

Dalam peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Bab IV Pasal 22 tidak dijelaskan mengenai mekanisme penerapan sanksi yang berupa pemberhentian sementara. Untuk itu penulis tertarik untuk mengkaji mengenai mekanisme penerapan putusan DKPP ditinjau dari *fikih siyasah*, dideSKripsikan dalam sebuah karya ilmiah SKripsi dengan judul *“Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (Studi Analisis Terhadap Putusan DKPP RI No. 16-PKE-DKPP/I/2019)”*.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan mengenai latar belakang masalah di atas maka dapat ditentukan rumusalah masalah sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Departemen Agama Islam RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012) , h. 131.

1. Bagaimana mekanisme penetapan putusan oleh DKPP pada putusan No. 16-PKE-DKPP/I/2019?
2. Bagaimana tinjauan fikih siyasah terhadap mekanisme penetapan putusan oleh DKPP pada putusan No. 16-PKE-DKPP/I/2019?

#### **E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui bagaimana mekanisme penetapan putusan DKPP No. 16-PKE-DKPP/I/2019.
2. Mengetahui bagaimana pandangan fikih siyasah terhadap mekanisme penetapan putusan DKPP No. 16-PKE-DKPP/I/2019.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis
  - a. Memberikan pemahaman mengenai mekanisme putusan DKPP.
  - b. Dapat membawa perkembangan pada ilmu pengetahuan khususnya pada jurusan siyasah.
  - c. Untuk menambah referensi, bahan literatur atau pustakan dalam memahami DKPP.
2. Kegunaan praktis
  - a. Dapat memberikan masukan kepada lembaga penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan tugasnya yang telah diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017.



- b. Sebagai syarat untuk meraih gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## F. Metode Penelitian

Agar menghasilkan penelitian yang komprehensif dan integral, maka penulisan skripsi ini menggunakan beberapa rangkaian sistematika penulisan sebagai berikut :

### 1. Jenis dan sifat penelitian

#### a. Jenis penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*), penelitian pustaka adalah penelitian yang menggunakan literatur (kepustakaan) baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu yang digunakan sebagai data sekunder.<sup>14</sup>

Dalam skripsi ini literatur yang digunakan adalah buku-buku fikih siyasah dan buku-buku hukum lainnya yang berkaitan dengan lembaga peradilan kode etik serta beberapa tulisan yang dimuat dalam jurnal-jurnal yang membahas mengenai DKPP.

#### b. Sifat penelitian

Kemudian sifat penelitian ini yaitu deskriptif analitis, yang dimaksud deskriptif analitis adalah suatu metode yang di dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran,

---

<sup>14</sup> Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung; Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 10.

atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada dan fenomena tertentu.

Fenomena yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah fenomena yang berupa sebuah kasus pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Mengenai unsur-unsur yang berhubungan adalah hubungan antara lembaga DKPP dengan lembaga *hisbah*.

## 2. Sumber data

Adapun sumber data dalam penelitian ini sebagai berikut :

### a. Bahan hukum primer (*primery law material*)

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum atau (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan hakim).

### b. Bahan hukum sekunder (*secondary law material*)

Yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak atau elektronik).<sup>15</sup>

## 3. Pengumpulan data

Mengingat penelitian ini adalah penelitian kepustakaan maka peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber buku yang ada seperti literatur pemikiran ilmu politik Islam, dan fikih siyasah serta tulisan-

---

<sup>15</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 82.

tulisan yang lain termasuk media internet untuk mengakses bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan.

#### 4. Pengolahan data

##### a. Pemeriksaan data (*editing*)

Yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah.

##### b. Penandaan data (*coding*)

Yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku literatur, perundang-undangan atau dokumen); pemegang hak cipta (nama penulis, Tahun penerbitan); atau urutan rumusan masalah (masalah pertama tanda A, masalah kedua tanda B, dan seterusnya). Catatan atau tanda dapat ditempatkan dalam *body text*. Jika itu buku literatur, catatan terdiri dari nama penulis, Tahun penerbitan, dan halaman. Jika itu perundang-undangan, catatan terdiri dari Nomor Pasal, Nomor, Tahun, judul undang-undang. Jika itu putusan pengadilan, catatan terdiri dari nama pengadilan yang memutus perkara, nomor kode, Tahun, dan judul putusan. Jika itu dokumen atau catatan hukum, catatan terdiri dari nama, Nomor kode, dan peristiwa hukum untuk mana dokumen atau catatan hukum itu dibuat. Catatan atau tanda dapat juga ditempatkan di bagian bawah teks yang disebut catatan kaki (*footnote*) dengan Nomor urut.

c. Rekonstruksi data (*reconstructing*)

Yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.<sup>16</sup>

5. Analisis data

Adapun metode analisa data yang penulis gunakan adalah Metode deskriptif-analisis, metode ini penulis gunakan dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut, kemudian diperoleh kesimpulannya.

Pertama-tama penulis akan memaparkan data yang berupa kasus pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, yang selanjutnya akan penulis analisis menggunakan UU No. 7 Tahun 2017 dan peraturan DKPP. Kemudian penulis akan memaparkan hasil analisis atas data tersebut dalam kesimpulan yang termuat di bab V.

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, h. 126.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dari hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan menjadi sebagai berikut :

1. Prinsip mandiri penyelenggara Pemilu telah diatur dalam peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017, disebutkan bahwa penyelenggara Pemilu dilarang untuk memiliki kedekatan dengan peserta Pemilu bahkan dilarang melakukan pertemuan dengan peserta Pemilu karena ditakutkan akan memberikan kesan kedekatan. dalam putusan Nomor 16-PKE-DKPP/I/2019 DKPP RI teradu yang sedang menjabat sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Pesawaran terbukti melakukan pelanggaran terhadap prinsip mandiri sebagaimana telah diatur dalam putusan DKPP Nomor 2 Tahun 2017. Hal tersebut membuktikan bahwa penyelenggara Pemilu di Indonesia masih patut untuk dipertanyakan profesionalitasnya.
2. Tinjauan fikih siyasah terhadap kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia memiliki kewenangan yang identik sama dengan lembaga peradilan lembaga *hisbah* yang ditinjau dari *siyasah dusturiyah*. Adapun *hisbah* dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemiui ini identik sama namun tidak sama persis. Karena lembaga DKPP dan *hisbah* sama-sama melakukan pengawasan dan



menangani kasus terkait dengan pelanggaran etika dan moral. Serta kedua lembaga ini dapat menjatuhkan hukuman bagi orang-orang yang melakukan pelanggaran.

## **B. Saran**

Dari pembahasan dalam SKripsi ini, penulis memiliki beberapa saran yang perlu penulis ungkapkan demi kebaikan bagi semua pihak, yaitu :

1. Penulis berharap penyelenggara Pemilu di Indonesia dapat menjadi lembaga yang sepenuhnya dapat dipercaya oleh masyarakat sebagai lembaga yang benar-benar profesional dalam menjalankan tugasnya.
2. DKPP sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang mengadili kasus pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sudah sepatutnya mengeluarkan putusan setegas-tegasnya agar ke depannya kasus pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu di Indonesia dapat berkurang.
3. Kepada masyarakat yang dalam hal ini selaku pengamat wajib ikut berperan aktif dalam menegakkan kode etik dalam tubuh penyelenggara Pemilu.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Quran

Departemen Agama Islam RI, *al-Qur'an dan terjemahannya* PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012

### 2. Hadis

M. Syamsi Hasan, *Hadis-Hadis Populer* Surabaya, Amelia Surabaya, 2015

### 3. Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004

Ayi Sofyan, *Etika Politik Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012

Departemen Pendidikan Nasional, *kamus besar bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008

Dzajuli *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*

*Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2003

Imam al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah : Hukum-Hukum Penyelenggara Negara Dalam Syariat Islam* Bekasi, PT. Darul Falah, 2017

J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: Rajawali Press, 1994

Muhammad Iqbal Isl, *Fiqh Siyasah- kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Indonesia: Pranadamedia Group:2014

Susiadi, *Metodologi Penelitian* Bandar Lampung; Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015

T.M Hasbi As-shiddiqiey, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001, h. 96

### 4. Hukum dan Undang-Undang

Pasal 155 ayat (2) *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017* tentang Pemilihan Umum.

Pasal 1 ayat (4) *Peraturan dewan kehormatan penyelenggara pemilihan umum Republik Indonesia* Nomor 2 tahun 2019.

Pasal 1 Angka 4 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum

Putusan Nomor 16-PKE-DKPP/I/2019 Dewan kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia

## **5. Jurnal dan Sumber Lainnya**

Abdul Wahid, *Jurnal Etika & Pemilu* Edisi 1, Mei 2015

Editorial, *Jurnal etika dan pemilu* vol. 4 no. 1, juni 2018.

<http://sarwono-supeno.blogspot.co.id/2012/04/pengertian-pelanggaran.html.10/09/2019>

<https://harianmomentum.com/read/15100/anggota-bawaslu-pesawaran-diberhentikan-ini-sebabnya>, (20 Oktober 2019).

<http://dkpp.go.id/sejarah-dkpp/> 28 Oktober 2019, pukul 17.34

Jihan Anjanja Aldi, et al, *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 5 No. 2, September 2019

Jihan Anjanja Aldi, et al, “*Tinjauan Yuridis Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP Dalam menciptakan Pemilu Yang Demokratis Di Indonesia*” *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 5 No. 2, September 2019

Khairuddin Wahid, “*Signifikansi Lembaga al-Hisbah Dalam Sistem Ekonomi Islam*”, Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan, Volume 5, No. 2, 2018

M. Luti Chakim, *Jurnal Konstitusi*, Volume 11, Nomor 2, Juni 2014

Zulaikha, *Etika Profesi Hakim Dalam Hukum Islam, Al-‘Adalah* Vol. XII, No. 1 Juni 2014

Zulfikri Suleman, “*Mahkamah Etik Penyelenggara Negara Di Negara Indonesia*” *Jurnal Etika & Pemilu* Edisi 1, Mei 2015